

**TEORI-TEORI PSIKOLOGI SOSIAL TENTANG KEKERASAN KOLEKTIF**

**Oleh :**  
**Dr. Zainal Abidin, M.Si**



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG, OKTOBER 2007**

TELAH DICATAT/DIDOKUMENTASIKAN PADA  
PERPUSTAKAAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kepala Perpustakaan



Dr. Ratna Jatnika, MT  
NIP. 19632021988032003

Telah diperiksa oleh :  
Guru Besar/Dosen Senior



Prof. Dr. Hj. Kusdwiratri Setyono

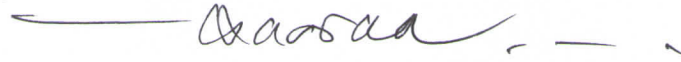
Mengetahui :

Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Hj. Juke Roosjati Siregar, M.Pd  
NIP. 1947111819032001

**KETUA BAGIAN PSIKOLOGI KLINIS**



**Drs. H. Hatta Albanik, M.Psi**  
**NIP. 194705121981031001**

**Mengetahui :**  
**Dekan Fakultas Psikologi**  
**Universitas Padjadjaran**



**Prof. Dr. H. Juke Roosjati Siregar, M.Pd**  
**NIP. 1947111819032001**

**Terdaftar di Perpustakaan**  
**Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran**



## TEORI-TEORI PSIKOLOGI SOSIAL TENTANG KEKERASAN KOLEKTIF

Oleh:

Dr. Zainal Abidin, M.Si.

Fakultas Psikologi Unpad, Bandung

### 1. Pendahuluan

Kita sering merasa heran menyaksikan orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan massa. Mereka begitu beringas, kejam, tidak mengenal takut, bahkan ketika dihadapi secara keras oleh para petugas kemananan (polisi dan tentara). Padahal mayoritas di antara mereka sebetulnya adalah para pemuda baik-baik, yang mungkin tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Namun, begitu mereka adalah dalam kerumunan, atau massa, keberanian dan bahkan kekejaman mereka muncul sehingga tanpa rasa belas kasihan dapat menyerang siapa pun yang dianaggap lawan mereka.

Para psikolog sosial menduga bahwa kelompok, kerumunan, grup, atau massa memiliki karakter dan tabiat yang berbeda dibandingkan individu-individu yang menjadi anggota-anggotanya. Sejumlah teori diajukan oleh para psikolog sosial dan para sosiolog untuk menjelaskan karakter massa yang mampu melakukan kekerasan. Berikut ini adalah sejumlah teori dalam psikologi massa mengenai dinamika dan kepribadian orang dalam massa yang dapat melakukan kekerasan.

### 2. *Contagion Theory* dan *Deindividuation theory*

Sebuah teori klasik tentang kekerasan kolektif dikemukakan oleh seorang dokter yang berasal dari Perancis, bernama LeBon (*original: 1895; 1999*). Menurut tokoh utama *contagion theory* ini, tingkah laku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari tingkah laku individu-

individu yang menjadi anggotanya. Tingkah laku kolektif ini, yang kemudian oleh LeBon disebut *crowd*, mempunyai ciri-ciri yang khas, yakni sangat emosional, irrasional, dan spontan. Ada penularan emosi (*emotional contagion*) di antara para anggota suatu *crowd* sehingga sikap, perasaan, dan tingkah laku mereka tampak sama dan seragam. Mereka saling menularkan emosi mereka. Akibatnya, ketika ada seseorang yang melakukan pemukulan atau pembakaran, maka pemukulan atau pembakaran yang sama akan dilakukan oleh orang-orang lain di sekitarnya (*behavioral contagion*). Mereka bertingkah laku secara seragam dan homogen, seolah-olah digerakkan oleh suatu "jiwa kolektif".

"Jiwa kolektif" itu sangat berbeda dari jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi individu yang membangunnya. Jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi mereka mengalami transformasi dalam "jiwa kolektif". Siapapun mereka, apapun kepribadian dan pekerjaan mereka, bisa berubah menjadi homogen dan seragam dalam "jiwa kolektif" itu:

*"Whoever be the individuals that compose it, however like or unlike be their mode of life, their occupations, their character, or their intelligence, the fact that they have been transformed into a crowd put them in possession of a sort of collective mind which makes them feel, think, and act in a manner quite different from that in which each individual of them would feel, think, and act were he in a state of isolation.*  
(Le Bon, 1999, p.47)

Gagasan inti dari teori LeBon ini, yang kemudian dikenal dengan nama *contagion theory*, dapat ditemukan kembali dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Festinger, Zimbardo, dan Diener. Dalam teori mereka yang disebut *deindividuation theory*, Zimbardo, dkk (2000) dan Diener (1979) menegaskan bahwa individu-individu dalam kelompok mempunyai kesamaan emosi dan tingkah laku serta mampu melakukan kekerasan karena mereka mengalami deindividuasi. Deindividuasi adalah hilang atau menurunnya kesadaran-diri individu, sehingga tingkah lakunya cenderung impulsif. Akan tetapi dengan adanya pengalaman deindividuasi tersebut tidak berarti bahwa jiwa individu digantikan oleh "jiwa

kolektif”, melainkan lepasnya kendali yang bersifat internal (Postmes & Spears, 1998). Individu tidak lagi mengendalikan emosi dan dorongan agresifnya, dan tidak merasakan takut terhadap akibat (hukuman) dari tingkah lakunya. Menurut Postmes & Spears (1998), pengaruh deindividuasi pada tingkah laku kekerasan kolektif disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, orang dalam kelompok besar atau *crowd* gampang mengembangkan perasaan anonim, perasaan bahwa ia bukan individu unik, melainkan sebagai komponen dari suatu *crowd* atau massa. Kedua, menjadi bagian dari *crowd* membuat mereka kurang bertanggung jawab atas tingkah laku mereka yang menyimpang. Ketiga, kehadiran banyak orang lain dalam kerumunan merupakan model bagi individu untuk menandingi atau menyamai mereka.

### **3. Relative Deprivation Theory**

Teori lainnya dikemukakan oleh Hovland & Sears (1940; Sears, Peplau, Freedman, & Taylor, 1988). Dengan menggunakan *frustration-aggression theory* (F-AT), kedua sarjana psikologi sosial tersebut mengadakan penelitian di 14 negara bagian selatan USA yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang disebabkan oleh jatuhnya harga kapas. Mereka menunjukkan bahwa ada hubungan antara harga kapas dengan pembantaian warga kulit hitam antara tahun 1892-1930. Pada saat harga kapas tinggi, hanya sedikit jumlah pembantaian terhadap warga kulit hitam, tetapi ketika harga kapas jatuh, jumlah pembantaian meningkat secara signifikan. Hovland & Sears menarik kesimpulan bahwa depresi ekonomi menimbulkan frustrasi pada sejumlah warga kulit putih di 14 negara bagian USA dan frustrasi yang mereka alami mendorong mereka untuk melakukan kekerasan terhadap warga kulit hitam. Dengan menggunakan dasar teori yang sama, penelitian lainnya dilakukan oleh Ivo dan Rosaline Feirabend (1968, 1972, dalam Geen, 1990), Gurr (1970), dan dewasa ini antara lain oleh Heprow & West (1988), dan Green, Glaser, & Rich (1998).

Penelitian yang dilakukan oleh Ivo dan Rosaline Feirabend (1968, 1972, dalam Geen, 1990) di 84 negara yang sedang mengalami instabilitas politik menunjukkan, bahwa banyak orang di negara-negara berkembang mengalami frustrasi karena terjadinya perubahan besar dalam kehidupan mereka: desa menjadi kota, jumlah barang konsumtif meningkat secara pesat, masyarakat semakin pintar dan kritis - tetapi keberhasilan "pembangunan" tersebut tidak diikuti oleh kemampuan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan atau inginkan. Ada jurang yang lebar antara harapan dan kenyataan, antara kebutuhan yang semakin meningkat dan pemenuhan kebutuhan yang tidak atau kurang terpenuhi. Bagi banyak orang hal itu menimbulkan dan meningkatkan frustrasi. Akibatnya, agresi atau kekerasan sosial semakin meningkat.

Dengan menggunakan dasar teori yang sama dengan F-AT, Gurr (1974) mengemukakan sebuah teori yang disebut *relative deprivation theory* (RDT). Menurut Gurr, deprivasi relatif (*relative deprivation*) merupakan mekanisme psikologis yang menimbulkan frustrasi dan mendorong orang untuk melakukan protes dan kekerasan. Definisi yang lebih teknis tentang deprivasi relatif dirumuskan sendiri oleh Gurr (1974, p.24) sebagai berikut:

*Relative deprivation (RD) is defined as a perceived discrepancy between men's value expectations and their value capabilities. Value expectations are the goods and conditions of life to which people believe they are rightfully entitled. Value capabilities are the goods and conditions they think they capable of attaining or maintaining.*

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Gurr menegaskan bahwa dibandingkan dengan konsep frustrasi, deprivasi relatif lebih tepat untuk menjelaskan kondisi psikologis pada tingkat kolektif daripada tingkat individual. Berkali-kali ia menegaskan bahwa ruang lingkup deprivasi relatif adalah kelas, masyarakat, bangsa, atau kolektivitas orang. Oleh sebab itu istilah "*value expectations*" dan "*value capabilities*" pun mengacu bukan hanya pada individu, melainkan terutama pada

kelompok atau masyarakat. Mengenai “*value expectations*”, Gurr (1974, p. 27) menulis,

*“The value expectations of a collectivity are the average value positions to which its members believe they are justifiably entitled. Value position is the amount of level a value actually attained. Value expectations refer to both present and future conditions. Men ordinarily expect to keep what they have; they also generally have a set of expectations and demands about what they should have in the future, which is usually as much or more than what they have at present.”*

Sedangkan, mengenai “*value capabilities*”, ia (Gurr, 1974, p.27) menulis,

*The value capabilities of a collectivity are the average value position its members perceive themselves capable of attaining or maintaining. Value capabilities also have both present and future connotations. In the present, value capabilities are represented by what men have actually been able to attain or have been provided by their environment: their value position. In the future, value capabilities are what men believe their skills, their fellows, and their rulers will, in the course of time, permit them to keep or attain: their value potential.”*

Berdasarkan definisi tentang deprivasi relatif dan faktor-faktor yang menyebabkannya, Gurr kemudian membedakan tiga pola deprivasi relatif berikut ini. Pertama, *decremental deprivation*. Pola deprivasi ini terjadi ketika ekspekstasi nilai yang diinginkan oleh kelompok sosial tertentu relatif konstan, sedangkan kemampuan mereka (*group's value capabilities*) untuk mewujudkan ekspekstasi itu cenderung turun. Misalnya, keinginan atau harapan kelompok untuk mendapatkan suatu barang tertentu (katakanlah, barang kebutuhan pokok) sebetulnya tidak meningkat atau sama saja seperti beberapa waktu sebelumnya, tetapi untuk mendapatkan barang itu menjadi sangat sulit karena daya beli atau nilai mata uang yang dimiliki oleh kelompok itu cenderung turun. Kedua, *aspirational deprivation*. Pola deprivasi ini terjadi ketika kemampuan kelompok relatif statis (tetap), sedangkan tingkat ekspekstasi mereka cenderung meningkat. Misalnya, daya beli atau nilai mata uang yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu sebetulnya sama seperti dulu,



tetapi harapan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu barang tertentu cenderung meningkat. Ketiga, *progressive deprivation*. Pola deprivasi ini terjadi ketika ekspekstasi kelompok secara simultan meningkat, sedangkan kemampuan mereka untuk mewujudkan ekspekstasi itu cenderung menurun. Misalnya, keinginan atau harapan kelompok untuk mendapatkan suatu barang meningkat, padahal daya beli atau nilai mata uang yang dimiliki untuk mendapatkan barang itu justru menurun.

Persepsi terhadap adanya diskrepansi tersebut akan menimbulkan suatu perasaan yang oleh Gurr disebut *discontent* (perasaan tidak puas). *Discontent* ini, jika dibiarkan terlalu lama, dan ada pembenaran normatif yang mendukungnya, dapat mendorong sekelompok orang untuk melakukan kekerasan yang bersifat massal (kolektif). Sebagaimana ditegaskan oleh Gurr (1974, h.13) berikut ini:

*Deprivation-induced discontent is a general spur to action.... the greater the intensity of discontent, the more likely is violence. The specificity of this impulse to action is determined by men's belief about sources of deprivation, and about the normantive and utilitarian justifiabilty of violent action directed at the agents responsible for it.*

Selanjutnya dikatakan oleh Gurr bahwa perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau negara akan mendorong tingkat dan intensitas harapan (ekspektasi) warganya dalam banyak hal, misalnya dalam hal perbaikan kehidupan ekonomi, keamanan, kualitas sosial, kebebasan, dll. Akan tetapi, jika harapan tersebut tidak disertai oleh meningkatnya kapabilitas, maka intensitas ketidakpuasan (*discontent*) akan lebih meningkat daripada sebelum terjadinya perubahan. Jika hal ini terjadi, maka para anggota kelompok (masyarakat) tertentu akan menyalurkan perasaan deprivasi mereka dalam bentuk kekerasan kolektif. Ia menulis, "*Widespread discontent provides a general impetus to collective violence*". (Gurr, 1974, h. 13).

Teori Gurr di atas boleh jadi dapat menjelaskan maraknya gejala penghakiman massa Pasca Orde Baru (setelah tahun 1998) di Indonesia. Setelah Orde Reformasi memegang kendali pemerintahan, maka ekspektasi masyarakat akan kehidupan ekonomi, keamanan, dan kebebasan semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi, karena tidak disertai oleh meningkatnya kapabilitas mereka (dan kapabilitas pemerintah) dalam mewujudkan harapan tersebut, maka meningkat pula intensitas *discontent* mereka. Salah satu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah kekerasan kolektif, termasuk penghakiman massa.

Deprivasi relatif yang dialami oleh kolektivitas individu sebetulnya tidak hanya ditentukan oleh adanya diskrepansi antara apa yang mereka miliki (*value capability*) dan apa yang mereka harapkan (*value expectation*). Ada faktor lain juga yang menyebabkan mereka mengalami deprivasi relatif, yakni faktor perbandingan sosial dengan *reference group* (Runciman, 1972; Gurr, 1974; Muller, 1980). Artinya, mereka mengalami deprivasi relatif bukan hanya karena apa yang mereka harapkan ternyata tidak bisa dimiliki oleh mereka, tetapi juga karena orang atau kelompok lain yang menjadi referensi buat mereka, ternyata bisa memiliki apa yang ingin mereka miliki.

Sebagai contoh, bayangkanlah kondisi suatu kampung berikut ini. Warga masyarakat di kampung itu berharap bahwa hidup mereka bisa lebih aman dan aparat penegak hukum bisa melindungi mereka, serta menangkap dan memberi hukuman yang adil pada setiap pelaku kejahatan yang mengganggu kampung mereka. Akan tetapi aparat penegak hukum yang diharapkan bisa membantu mereka tersebut ternyata korup dan tidak efektif, sehingga kualitas dan kuantitas kejahatan di kampung tersebut semakin merejalela. Padahal mereka mempersepsi bahwa situasi di kompleks perumahan yang dihuni oleh orang-orang yang lebih mampu (kaya) cukup aman dan polisi cukup

tanggap jika mendapatkan laporan tentang kejahatan yang terjadi di perumahan tersebut. Kondisi seperti itu menimbulkan perasaan *deprived* pada warga perkampungan.

#### 4. *Perceived Law Enforcement*

Hasil beberapa penelitian yang dilakukan oleh Black (1983; Black, dalam Tedeshi & Felson, 1994) menunjukkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap muncul tidaknya kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap para pelanggar norma atau para pelaku kejahatan. Menurutnya, jika suatu sistem hukum dirasakan oleh masyarakat tidak efektif atau tidak berjalan secara semestinya, maka bukan hanya kejahatan yang meningkat, tetapi kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap pelaku kejahatan pun meningkat pula. Black (1983) menyebut situasi ini sebagai *self-help*. Artinya, orang merasa harus melindungi dirinya sendiri dari kejahatan dengan cara memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Pemberian hukuman ini dianggap penting karena aparat penegak hukumnya sendiri tidak berfungsi secara semestinya. Dalam arti ini, penghakiman massa misalnya, merupakan suatu bentuk kekerasan yang berfungsi sebagai pengganti hukuman formal (legal), yang seharusnya dilakukan oleh lembaga formal. Karena lembaga formal tidak berfungsi efektif, maka kelompok-kelompok wargalah yang memberikan hukuman (melakukan kekerasan) sebagai suatu bentuk *self-help*, atau lebih tepat lagi "*social-help*".

Akan tetapi kenyataan sering menunjukkan bahwa bukan *law enforcement*-nya *an sich* yang menentukan muncul tidaknya kekerasan, melainkan persepsi pelaku terhadap *law enforcement*-nya yang justru menentukan. Faktor persepsi inilah yang mendorong pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan kekerasan terhadap si penjahat. Jika pelaku mempersepsi bahwa perangkat hukum berjalan tidak semestinya,

sehingga aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat terus berlangsung di wilayahnya, maka ia merasa perlu untuk menegakkan hukumnya sendiri. Dari penelitian Black (dalam Tedeshi & Felson, 1994) terbukti bahwa orang-orang miskin (*low status*) lebih banyak menghindari sistem hukum karena pengaduan mereka sering tidak dipercaya oleh polisi, sehingga mereka pun tidak percaya pada kinerja dan niat baik polisi. Bagi kelompok orang miskin hukum dinilai tidak berjalan secara benar. Hukum dianggap hanya melindungi si kaya, tetapi tidak untuk si miskin. Akibatnya, kekerasan terhadap pelanggar norma atau terhadap penjahat lebih banyak berlangsung di lingkungan orang miskin, dibandingkan di lingkungan orang kaya.

*Law enforcement* pada dasarnya merupakan *external control* bagi para pelaku kejahatan dan sekaligus bagi para pelaku penghakiman massa. *Law enforcement* dapat berfungsi baik sebagai *external inhibition* maupun sebagai *external disinhibition*. Jika *law enforcement* berjalan efektif, misalnya aparat penegak hukumnya berlaku adil dan mampu menangani berbagai kasus kejahatan, maka ia menjadi *external inhibition*. Artinya, meski terjadi pelanggaran hukum/norma, kecil sekali kemungkinan terjadi kasus penghakiman massa, karena risiko yang harus dibayar oleh para pelaku terlalu besar (yaitu, hukuman formal dan legal dari aparat penegak hukum). Sebaliknya, jika *law enforcement* berjalan tidak efektif, maka ia menjadi *external disinhibition*, sehingga pelanggaran norma atau pelanggaran hukum dapat menimbulkan penghakiman massa terhadap para pelaku kejahatan.

Penjelasan di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh teori belajar sosial (*social learning theory*) (Bandura, 1977). Menurut teori ini, individu akan meniru atau mengulang suatu tingkah laku jika tingkah laku itu mempunyai konsekuensi positif (mendatangkan *reward*), tetapi akan menghindari suatu tingkah laku jika tingkah laku itu mempunyai konsekuensi negatif (menyebabkan *punishment*). Individu tidak hanya belajar dari pengalamannya sendiri (*instrumental learning*) untuk

mengetahui konsekuensi dari suatu tingkah laku, tetapi juga belajar dari pengalaman orang lain (*observational learning*). Misalnya, seorang individu mengamati bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku penghakiman massa ternyata membawa konsekuensi yang positif (*reward*), katakanlah berupa pujian dari warga setempat atau minimal tidak mendapatkan hukuman dari pihak kepolisian. Akibatnya, ia akan meniru tingkah laku yang sama dengan harapan bahwa mereka pun akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Sebaliknya, jika individu mengamati bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang lain (para pelaku dalam suatu penghakiman massa) ternyata membawa konsekuensi negatif (*punishment*), katakanlah ditindak secara hukum atau dicemooh oleh warga setempat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena konsekuensinya dipastikan akan tidak menyenangkan juga.

Penjelasan di atas pun sesuai dengan pendapat Smelser (1971) tentang adanya unsur mekanisme kontrol yang bersifat eksternal yang mampu mencegah dan menghambat tingkah laku kolektif, termasuk kekerasan kolektif. Smelser menyebutkan beberapa unsur penting yang mengkondisikan suatu tingkah laku kolektif, dan salah satunya yang sangat penting adalah berfungsi atau tidaknya mekanisme kontrol yang bersifat eksternal (*operation of social control mechanism*). Jika otoritas hukum dan mekanisme kontrol lainnya dalam suatu masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tingkah laku kolektif, dan bahkan kekerasan kolektif, tidak akan bisa dicegah atau dihindari. Merujuk pada sejarah kekerasan di Amerika Serikat, Smelser (1971, p.239) menarik kesimpulan sebagai berikut:

*“The conviction that justice is not being adequately perpetrated through legal channels lies behind many instances of vigilantism, lynching, and mob activity in the history of the United States.”*

Sebaliknya, jika otoritas hukum dan mekanisme kontrol lainnya dalam suatu masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya, maka tingkah laku kolektif, apalagi kekerasan kolektif, kecil kemungkinan untuk terjadi.

### 5. *Mob Identification*

Dalam tingkah laku kolektif (termasuk dalam *crowd* dan *mob*) terdapat suatu proses atau mekanisme psikologis yang disebut *mob identification* atau *collective identification* (Hogg. & Abrams, 1988; Reicher, 1996; Klandermans, 1997). *Collective identification* adalah gambaran yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok tertentu tentang diri mereka sendiri, bahwa mereka merupakan bagian atau anggota atau bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok itu. Akibatnya, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertingkah laku mereka didasarkan pada gambaran yang dimiliki oleh mereka tersebut. Mekanisme yang sama dapat terjadi dalam kasus penghakiman massa. Para pelaku, supporter, dan bahkan sebagian penonton mengalami identifikasi ke dalam massa (*mob identification*). Mereka merasa menjadi bagian atau anggota dari suatu massa, sekerumunan orang yang memiliki kesamaan, yakni bahwa mereka merupakan "korban" dari pelanggaran norma/hukum yang dilakukan oleh si pelanggar norma/hukum (yakni, pelaku kejahatan). Dengan perkataan lain, para pelaku, supporter, dan sebagian penonton merasa diri mereka sebagai *ingroup* dengan anggota-anggota penghakiman massa lainnya, sedangkan si pelaku kejahatan, yang kemudian menjadi "korban" kekerasan mereka, adalah *outgroup*.

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang peran *collective identification* dalam tingkah laku kolektif (misalnya, Reicher, 1996; Klandermans, 1997; Simon, Loewy, Stumer, Weber, Freytag, Habig, Kampmeier, & Spahlinger, 1998) menegaskan tentang signifikansi dari pengaruh *mob identification* atau *collective identification* pada tingkah laku kolektif, termasuk tingkah laku *mob*. Menurut mereka, *collective*

*identification* merupakan prediktor untuk menjelaskan munculnya tingkah laku kolektif, termasuk *crowd* dan *mob*.

*Collective identification* diasumsikan juga merupakan unsur yang sangat penting dalam mendorong sejumlah orang untuk melakukan kekerasan yang bersifat kolektif terhadap orang-orang yang dipersepsi sebagai pelanggar norma /hukum. Pelanggaran norma/hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu lain, bisa meningkatkan identifikasi anggota-anggota kelompok tertentu yang menghormati atau menjunjung tinggi norma/hukum tersebut. Mereka merasakan adanya suatu kesamaan di antara mereka, yakni sama-sama sebagai kelompok "korban" dan memiliki persepsi yang sama terhadap pelaku pelanggaran norma/hukum, yakni sebagai lawan yang harus diberi hukuman. Identifikasi tersebut, secara spontan, akan mempertebal "identitas kolektif" (*collective identity salient*), yang dalam kasus penghakiman massa disebut "massa". Dengan terbentuknya identitas kolektif itu, tumbuhlah kepatuhan dan konformitas terhadap massa dan muncul pula perbedaan yang tegas antara *ingroup* (para partisipan dalam massa) dan *outgroup* (anggota pelanggar norma atau pelanggar hukum). Akibat selanjutnya dari polarisasi antara *ingroup* dan *outgroup* adalah upaya untuk mendehumanisasikan anggota *outgroup*, karena mereka dianggap sebagai makhluk yang tidak layak untuk hidup.

Dengan menggunakan landasan teori belajar sosial (*social learning theory*), hal itu pernah dikemukakan oleh Bandura (1973, h.213-4):

*".... social practices that divide people into ingroup and outgroup members produce human estrangement conducive to dehumanization. Strangers can be more easily cast as subhuman villains than can personal acquaintances."*

Dalam kondisi ini, kekerasan terhadap pelanggar norma/hukum sangat mungkin terjadi, jika kelompok ini mempersepsi individu atau kelompok individu lain (*outgroup*) sebagai pelanggar norma/hukum dan oleh sebab itu perlu diberi hukuman yang sangat keras.

Akan tetapi, berbeda dari proses identifikasi kolektif lain seperti dalam kasus stereotip etnis (Warnaen, 2002), prasangka etnis (Abidin, 1999), dan tawuran antarpelajar (Mansoer, 2000), proses identifikasi kolektif dalam kasus penghakiman massa relatif lebih bersifat spontan dan temporer. Dalam kasus tawuran misalnya, para pelajar yang terlibat perkelahian antarsekolah mengkategorisasikan dan mengidentifikasi dirinya ke dalam kelompok sekolah tertentu atas dasar keanggotaannya di sekolah itu dan atas dasar solidaritas sesama teman sekolah. Keterlibatan mereka dalam tawuran secara historis dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat di lingkungan sekolah itu (Mansoer, 2002). Sedangkan dalam penghakiman massa, para pelaku secara "spontan" mengkategorisasikan dan mengidentifikasi dirinya ke dalam massa (*mob*) saat melihat adanya pelanggaran norma/hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsi sebagai pelaku kejahatan.

Meminjam terminologi Brown (1969) dapatlah dikatakan bahwa jenis identifikasi pertama (yakni, kasus identifikasi pelajar yang terlibat tawuran) disebut identifikasi yang berlangsung secara cukup lama (*enduring*), sedangkan jenis identifikasi kedua (dalam kasus penghakiman massa) disebut identifikasi sesaat (*temporary*). Identifikasi yang berlangsung lama (*enduring identification*) adalah identifikasi seseorang ke dalam suatu kelompok melalui suatu proses penanaman nilai-nilai yang berlangsung cukup lama, misalnya identifikasi individu dalam institusi sekolah, keluarga, etnis, agama, bangsa. Sedangkan identifikasi yang bersifat sesaat (*temporary identification*) adalah identifikasi yang berlangsung secara spontan dan bersifat sementara, misalnya identifikasi individu dalam *mob* atau massa. Jenis identifikasi yang terakhir ini misalnya tampak dari pernyataan individu berikut ini: "Saya waktu itu memang pernah terlibat dalam melakukan pembakaran terhadap seorang maling sampai hangus". Dari pernyataan ini tampak bahwa individu itu pernah mengalami identifikasi ke dalam massa yang pada saat itu sedang



“menghakimi” seorang pelaku kejahatan. Tetapi sesudah penghakiman massa itu selesai, ia tidak lagi merasa menjadi bagian dari massa, dan “massa” serta anggota-anggotanya itu sendiri sudah tidak ada lagi di tempat itu.

## 6. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat dipahami, kenapa anggota massa atau pelaku kekerasan massa dapat bertindak sedemikian kejam, keras, tanpa belas kasihan, dan tidak kenal rasa takut, meski pun mereka barangkali jika berada di luar massa merupakan individu-individu baik-baik yang tidak pernah melakukan kekerasan atau berbuat kriminal. Alasan utamanya karena: 1) terjadi penularan emosi negatif di antara anggota massa, 2) penegakan hukum dipersepsi tidak adil, sehingga mereka sendiri yang harus menciptakan keadilannya sendiri, 3) ada ketidakadilan dalam masyarakat dan mereka adalah korban dari ketidakadilan itu, dan 4) terjadi identifikasi ke dalam mob sehingga kesadaran mereka sebagai individu digantikan oleh kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari mob.

## Daftar Pustaka

- Bandura, A. (1973). *Aggression. A social learning analysis*. Englecliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Barkan, S.E. & Snowden, L.L. (2001). *Collective Violence*. Boston: Allyn and Bacon.
- Blumer, H. (1970). Outline of collective behavior. In Robert E. Evans, *Readings in collective behavior*. Chicago: Rand McNally & Co., p.65-88.
- Christie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.W. (eds.) (2001). *Peace, conflict, & Violence*. New Jersey: Prentice-Hall.

- Colman, A.M. (1991). Crowd psychology in South African murder trials. *American Psychologist*. October, vol.46, No.10, 1071-1079.
- DiRenzo, G.J. (1990). *Human social behavior: Concepts and principles of sociology*. Forth Worth: Holt, Rinehart and Windston.
- vans, R.E. (ed.) (1970). *Readings in collective behavior*. Chicago: Rand Menally & Co.
- Galtung, J. & Tschudi, F. (2001). "Crafting peace: On the psychology of transcend approach". In hriestie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.W. (eds.) (2001). *Peace, conflict, & Violence*. New Jersey: Prentice-Hall, p.210-222.
- Gurr, T.B. (1974, fourth printing). *Why men rebel*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hall, H.V. & Whitaker, L.C. (1999). *Collective violence. Effective strategies for assessing and interviewing in fatal group and institutional aggression*. Boca Raton: CRC Press.
- Klandermans, B. (1997). *The social psychology of protest*. Oxford, England: Basil Blackwell.
- Krahe, B. (2001). *The social psychology of aggression*. East Sussex: Psychology Press. Ltd.
- LeBon, G. (1999). *The crowd*. (3<sup>rd</sup> printing). New Jersey:: Transaction Publishers. (Original work published 1895).
- Madden, D. & Barron, P. (2002). "Violence & Conflict Resolution in 'non-conflict' region: The case of Lampung, Indonesia". The report for the World Bank
- Milgram, S & Toch, H. (1969). "Collective behavior: Crowds and social movement", in Lindzey, G. & Aronson, E. (eds.), *The handbook of social psychology* (second edition), Massachusetts: Addison-Weshley Publ. Co.
- Reicher, S. (1996). The crowd century: reconciling practical success with theoretical failure. *British Journal of Social psychology*, 35, 535-553.
- Reicher, S., Levine, R.M., & Gordijn, E. (1998). "More on deindividuation, power relations between groups and the

expression of social identity: Three studies on the effects of visibility to the in-group." *British Journal of Social Psychology*. 37, 15-40.

Zimbardo, P.G., Haney, C., & Banks, W.C. (1973). A Study of prisoners and guards in a simulated prisons. In P.Banyard & A.Grayson (eds.), (2000) (second edition). *Introducing Psychological Research*. New York: Palgrave.